

ABSTRAK

Pailit merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang pihak kreditor. Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum seluruh kekayaan debitur pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama hasil penjualan tersebut untuk membayar semua utang-utang debitur secara proporsional dan sesuai struktur kreditor.

Hukum pidana dan hukum perdata adalah dua hukum yang sering beririsan atau bersinggungan, termasuk halnya dalam hukum kepailitan ketika terjadi penyitaan aset milik debitur. Kurator dalam menjalankan tugasnya sering berhadapan dengan penyidik Polri atau Kejaksaan ketika berkaitan dengan sita pidana atas bagian dari harta pailit debitur. Benturan antara Kepentingan Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan sita pidana dengan kepentingan kurator untuk melakukan sita umum kepailitan masih sering terjadi di lapangan. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur benda yang dapat disita oleh penyidik termasuk didalamnya benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat pula disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sedangkan Pasal 31 Ayat (2) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika di perlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretan.

Hasil penelitian ini yaitu kepentingan penyidik menyita barang atau aset adalah untuk menjadikannya bukti dalam proses penyelidikan atau penyidikan dan bukan untuk memiliki barang tersebut sehingga pada saat permasalahan pidana tersebut sudah diputus oleh Majelis Hakim yang menangani perkara barang bukti yang disita pidana tersebut akan dikembalikan kepada kurator. Diperlukan adanya suatu ketegasan dalam pengaturan mengenai harta debitur pailit yang bersamaan dilakukan penyitaan pidana. Perlu adanya pengaturan dalam perlindungan hukum pembeli perumahan karena dalam hal ini pembeli perumahan tersebut dapat dikategorikan sebagai kreditur konkuren dimana Kreditor konkuren adalah kreditor yang akan mendapatkan pelunasan terhadap utangnya pada posisi paling terakhir, itupun kalau ada sisa pembayaran. Hubungan antara pelaku usaha pengembang perumahan dan konsumen pembeli properti timbul dengan adanya perjanjian jual beli dan bukan hutang piutang maka sudah seharusnya posisi pembeli juga perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan uangnya kembali.

Kata Kunci: Kepailitan, Sita Umum, Sita Pidana.

ABSTRACT

Bankruptcy is a condition when the debtor is unable to make payments on the creditors' debts. Bankruptcy is a court decision which results in the general confiscation of the entire assets of bankrupt debtors, both existing and future ones. The management and acquisition of bankruptcy are carried out by the curator under the supervision of a supervising judge with the main objective of the sale being to pay all debtors' debts proportionately and in accordance with the creditor structure.

Criminal law and civil law are two laws that often intersect or intersect, including the case of bankruptcy law when a debtor's assets are confiscated. In carrying out their duties, curators often come face to face with police investigators or prosecutors when dealing with criminal confiscation of part of the debtor's bankruptcy assets. Conflicts between the interests of the police and the Attorney General's Office to carry out criminal confiscation and the interests of curators to conduct general bankruptcy are still common in the field. Article 39 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Procedure Code regulates objects that can be confiscated by investigators including objects that are in confiscation due to civil cases or bankruptcy can also be confiscated for the purposes of investigation, prosecution and prosecution of criminal cases while Article 31 Paragraph (2) UUK-PKPU which states that all confiscations that have been carried out will be deleted and if needed, the Supervising Judge must order a crossing.

The results of this study are that the interests of investigators confiscating goods or assets are to make evidence in the process of investigation or investigation and not to own the goods so that when the criminal matter has been decided by the Panel of Judges who handles the case of confiscated evidence the criminal will be returned to the curator. There is a need for assertiveness in the regulation regarding bankruptcy debtor assets which are simultaneously subject to criminal confiscation. There is a need to regulate the legal protection of housing buyers because in this case the housing buyer can be categorized as a concurrent creditor where the concurrent creditor is the creditor who will get the repayment of his debt at the very last position, and even if there is remaining payment. The relationship between housing developers and consumers of property buyers arises with the sale and purchase agreement and not the accounts receivable debt, so the buyer's position should also be considered to get the money back.

Keyword : *Bankruptcy, General Confiscation, Criminal Confiscation*